

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai aturan tentang pendirian dan penataan toko modern. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan-Peraturan tersebut dijelaskan beberapa syarat dan aturan yang harus dipenuhi sejumlah pihak jika ingin mendirikan toko modern di Bantul.

Adanya aturan-aturan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus menjaga eksistensi perekonomian lokal. Seperti melindungi keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil baik yang berjualan di pasar tradisional maupun toko-toko kecil. Ketentuan tersebut sejatinya tidak melarang pendirian toko/pasar modern di Bantul. Melainkan setiap elemen masyarakat di Bantul harus mematuhi peraturan yang ada seperti yang tertera pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada jika ingin mendirikan toko modern.

Sehubungan dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat, Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya untuk menjaga eksistensi perekonomian lokal yaitu dengan merevitalisasi pasar tradisional.

Revitalisasi pasar dilakukan dengan upaya agar pasar tradisional tetap mampu bersaing dengan pasar modern yang telah menjamur. Karena banyaknya jumlah masyarakat di Bantul yang sebagian besar bergantung pada pasar tradisional, agar tetap dapat mempertahankan pekerjaannya sebagai pedagang.

Adanya dua kebijakan pemerintah tentang pembatasan pasar modern dan revitalisasi pasar tradisional sangat berkaitan, karena pembatasan pasar modern tanpa adanya revitalisasi pasar tradisional adalah sama halnya dengan menyelesaikan masalah, namun tidak sampai ke akarnya. Kebijakan pembatasan pasar modern berfungsi sebagai regulator untuk menekan laju pertumbuhan pasar modern di Bantul, sedangkan kebijakan revitalisasi pasar tradisional bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern (Masitoh: 2013).

Meskipun pasar modern telah menjamur di Bantul, namun pasar tradisional tidak akan punah begitu saja. Banyak penduduk desa yang akan setia berbelanja di pasar tradisional. Penduduk di desa memiliki daya beli yang rendah, begitu pula budaya tawar menawar dalam berbelanja tidak bisa ditemui di pasar modern. Akan tetapi eksistensi pasar tradisional itu sendiri harus tetap dijaga. Senjata yang diperlukan untuk menjaga eksistensi pasar tradisional yaitu dengan peraturan pemerintah tentang perlindungan pasar tradisional dan perubahan dari pasar tradisional itu sendiri.

Dengan demikian, konsep revitalisasi pasar untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional sangat penting. Sudah barang tentu revitalisasi tidak hanya sebatas bangunan dan regulasi pemerintah. Akan tetapi, semua aspek yang menjadi instrument pasar tradisional memerlukan revitalisasi. Baik dari segi manajemen, pengembangan pasar, dana penunjang pengembangan, dan lain sebagainya.

Di Kabupaten Bantul terdapat 31 pasar sebagai wadah perekonomian masyarakat. Jumlah pedagang di Pasar Induk Kabupaten Bantul 1718 pedagang merupakan jumlah pedagang terbanyak dari pasar-pasar tradisional yang terdapat di Bantul. Berikut daftar pasar tradisional dan jumlah pedagang pasar yang ada di Bantul:

Tabel 1.1
Daftar Pasar dan Jumlah Pedagang di Kabupaten Bantul

No	Nama Pasar	Jumlah Pedagang
1	Bantul (Pasar Induk)	1718
2	Niten	926
3	Klitikan Niten	167
4	Janten	79
5	Piyungan	1089
6	Imogiri	1587
7	Angkruksari	513
8	Barongan	316
9	Mangiran	315
10	Jodog	595
11	Pijenan/ Gesikan	258
12	Hewan Pandak	82
13	Gataka	337
14	Pundong	636
15	Jejeran	711
16	Pleret	411
17	Hewan Imogiri	120
18	Sorobayan	290
19	Gumulan	263
20	Semampir	180
21	Sungapan	104
22	Turi	774
23	Celep	154
24	Panasan	231
25	Dlingo	195
26	Bendosari	67
27	Ngipik	41
28	Sangkeh	17
29	Grogol	26
30	Koripan	53
31	Jragan	47
	Jumlah	12311

Sumber: Kantor Pengelolaan Pasar 2016

Pasar Induk Bantul merupakan pasar induk yang terdapat di Kabupaten Bantul. Hal ini menjadikan Pasar Induk Bantul sebagai salah satu tempat pusat aktivitas perekonomian masyarakat. Selama aktivitas

perekonomian berlangsung, terjadi interaksi antara pedagang, pembeli, pengelola pasar, serta pemerintah daerah. Kegiatan jual beli di Pasar Induk Bantul tidak hanya dilakukan oleh warga Bantul saja. Banyak warga di sekitar Bantul yang berdagang di Pasar Induk Bantul, seperti warga dari Gunung Kidul, Kulon Progo, Kota Jogja, bahkan ada yang berasal dari Klaten Jawa Tengah.

Kesamaan fungsi antara pasar tradisional dan pasar modern mengakibatkan adanya persaingan antar keduanya. Akan tetapi, pasar tradisional harus menjaga eksistensinya agar dapat terus bersaing dengan pasar modern. Menurut Mudjarat Kuncoro (2008) dalam tulisannya “Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional”, terdapat isu utama yang berkaitan dengan perkembangan pasar tradisional, diantaranya yaitu :

1. Kondisi pasar tradisional secara fisik sangat tertinggal maka perlu ada program untuk melakukan pengaturan.
2. Penerapan berbagai macam syarat perdagangan oleh ritel modern yang memberatkan pemasok barang.
3. Tumbuh pesatnya minimarket (yang dimiliki pengelola jaringan) ke wilayah pemukiman.
4. Jarak antara pasar tradisional dengan hypermarket yang saling berdekatan.

Dari permasalahan isu utama tersebut, kelengkapan fasilitas serta kebersihan pasar sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pengunjung

dan untuk menjaga eksistensi pasar tradisional. Pelaksanaan program revitalisasi pasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sangat penting adanya untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern yang ada di Bantul. Agar terdapat peningkatan kualitas baik fisik maupun non fisik yang menjadikan pasar tradisional lebih baik, menghilangkan kesan kumuh, semrawut, panas dan bau.

Sebelum revitalisasi berlangsung, kondisi fisik Pasar Induk Bantul sudah sangat memprihatinkan. Mulai dari bangunan gedung yang sudah retak, atap yang bocor, serta lingkungan yang kumuh. Apalagi saat musim penghujan, lantai menjadi becek dan licin. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan baik pedagang maupun pembeli.

Mengulas kembali saat pelaksanaan revitalisasi Pasar Induk Bantul tersebut, pedagang hanya berjualan di tempat kecil yang terdapat didepan dan sayap kanan kiri pasar yang disediakan oleh pengelola pasar. Hal tersebut mengakibatkan pembeli kurang nyaman dengan tempat yang cenderung kumuh dan sempit, sehingga mereka sulit menemukan pedagang langganan mereka yang menyebabkan pembeli menjadi berkurang serta pasar cenderung sepi. Adanya revitalisasi pasar tidak serta merta berpengaruh positif bagi kondisi sosial dan kondisi ekonomi pedagang. Karena faktor lamanya revitalisasi dan perlunya adaptasi dengan lingkungan baru.

Dalam skripsi Joko (2013), hasil penelitiannya berisi implementasi, evaluasi kinerja, dan evaluasi dampak kebijakan penataan toko modern di

Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2010 tentang penataan toko modern. Dari dampak yang diuraikan dalam penelitian tersebut juga berimbas kepada keberadaan pasar tradisional. Didalamnya juga diuraikan upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar tradisional yaitu dengan merevitalisasi pasar. Hal ini yang mendorong minat peneliti untuk melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan dari program revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah daerah demi menjaga eksistensi pasar tradisional.

Penelitian ini mengangkat judul mengenai evaluasi kebijakan revitalisasi Pasar Induk Bantul Kabupaten Bantul tahun 2016, agar dapat diketahui hasil dari program revitalisasi pasar yang dijalankan pemerintah daerah tersebut. Apakah memberikan perubahan yang positif atau negatif bagi kesejahteraan pedagang di Pasar Induk Bantul. Dari hasil penelitian ini juga dapat memberikan saran berupa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pengelola pasar, maupun pedagang untuk memperbaiki keadaan agar eksistensi Pasar Induk Bantul tetap terjaga dan tidak kalah dengan pasar modern seperti tujuan yang diharapkan oleh pemerintah sebelum revitalisasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalahnya yaitu bagaimana evaluasi kebijakan program revitalisasi Pasar Induk Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan program revitalisasi Pasar Induk Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat untuk berbagai pihak :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya dalam masalah kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang telah dipelajari sekaligus untuk menambah pengetahuan tentang kebijakan publik serta untuk menyelesaikan tugas akhir.

b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai evaluasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional yang telah dilakukan di Pasar Induk Bantul.

- c. Bagi pihak-pihak lain, semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan jika ingin mengangkat penelitian yang sama.

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi. Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang revitalisasi pasar tradisional. Pertama, penulis menggunakan skripsi sebagai acuan. Jurnal dari Febriana Ida S dan Sugi Rahayu, M.Pd, M.Si yang berjudul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Mengenai Peraturan Penataan Toko Modern dan Perilaku Belanja Masyarakat Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul”. Jurnal ini berisi tentang peraturan penataan toko modern terhadap keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Tulisan ini juga menjelaskan tentang perilaku belanja masyarakat Kabupaten Bantul setelah adanya toko modern terhadap keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul serta persepsi masyarakat mengenai peraturan tentang penataan toko modern. Kelebihan dari penelitian ini yaitu isinya yang terperinci, pembahasannya yang jelas dan mudah untuk dipahami. Dari segi landasan teori menurut saya masih terlalu sedikit, sehingga kurang dapat menggambarkan secara detail teori-teori tersebut.

Acuan kedua yaitu Jurnal dari Eis Al Masitoh (2013), yang berjudul “Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul”. Penelitian ini berisi tentang revitalisasi pasar

Piyungan Bantul. Perlunya revitalisasi pasar Piyungan Bantul karena dampak dari bencana gempa bumi yang menimpa Jogja. Jurnal ini juga berisi tentang dampak negatif yang terjadi akibat revitalisasi serta dampak positif dari revitalisasi pasar Piyungan Bantul. Data-data yang tercantum sangat lengkap dan detail.

Ketiga, penelitian ini mengacu pada Skripsi dari Ahmad Izzudin dengan judul “Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Tradisional di Bantul”. Dari skripsi ini dapat diketahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul secara umum tentang pasar tradisional. Skripsi ini juga berisi tentang dua kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang pasar tradisional yaitu kebijakan pembatasan minimarket di Kabupaten Bantul dan kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Regulasi-regulasi yang relevan juga dicantumkan dalam penelitian ini. Teori yang dicantumkan dalam skripsi ini kurang lengkap karena pembahasannya yang singkat.

Keempat yaitu skripsi dari Bangkit Joko Pamungkas yang berjudul “Analisis Kebijakan Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul. Isi dari penelitian ini yaitu tentang implementasi, evaluasi kinerja, dan evaluasi dampak kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Bantul yang dituangka dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern. Teori yang tercantum dalam penelitian ini juga banyak sehingga mampu menggambarkan keadaan dari topik yang sedang dibahas pada penelitian ini.

Kelima, yaitu dari Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana Volume 2 Nomor 5 Tahun 2013. Tulisan dari A. A Mirah Pradnya Paramita dan A. A Ketut Ayuningsasi yang berjudul “Efektivitas dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjau. Jurnal ini terlalu singkat hanya berkisar 11 halaman. Menguraikan semua materi secara singkat beserta pembahasannya yang singkat. Namun 11 lembar ini dapat menggambarkan keseluruhan isi dari penelitian tersebut yang nantinya dapat menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukan ini. Dari kelima acuan yang telah dijabarkan di atas, akan dijelaskan secara terperinci dalam sebuah tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Penjabaran Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Febriana Ida S dan Sugi Rahayu, M.Pd, M.Si	Pengaruh Persepsi Masyarakat Mengenai Peraturan Penataan Toko Modern dan Perilaku Belanja Masyarakat Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul	Mengenai perilaku belanja dan persepsi masyarakat tentang peraturan penataan toko modern Kabupaten Bantul setelah adanya toko modern terhadap keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul.
2	Eis El Masitoh	Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul	Penelitian ini berisi tentang revitalisasi pasar Piyungan Bantul serta perlunya revitalisasi pasar Piyungan Bantul karena dampak dari bencana gempa bumi yang menimpa Jogja.
3	Ahmad Izzudin	Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Tradisional di Bantul	Skripsi ini berisi tentang dua kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang pasar tradisional yaitu kebijakan pembatasan minimarket di Kabupaten Bantul dan kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bantul.
4	Bangkit Joko Pamungkas	Analisis Kebijakan Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul	Penelitian ini tentang implementasi, evaluasi kinerja, dan evaluasi dampak kebijakan penataan toko Modern di Kabupaten Bantul yang ditungkan dalam Perbup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern.
5	A.A Mirah Pradnya dan A.A Ketut Ayuningsasi	Efektivitas dan dampak program revitalisasi pasar tradisional di pasar Agung Paninjul	Menguraikan efektivitas dan dampak program revtalisasi pasar tradisional di pasar Agung Paninjul

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Sebelum mengetahui apa itu kebijakan publik, pertama akan dijelaskan terlebih dahulu definisi dari kebijakan. Terdapat beberapa definisi kebijakan menurut para ahli, dikutip dari Suharno (2013):

1) Ealau dan Kenneth Prewitt

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya.

2) Carl Friedrich

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan definisi kebijakan di atas menurut Suharno (2013), kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan tersebut bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Kata publik dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti Negara, sistem

politik, serta administrasi. Sementara pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh seluruh anggota suatu sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem, bisa RT, RW, desa, kabupaten, provinsi, Negara hingga supra Negara (ASEAN, EU) dan dunia (WTO, PBB).

b. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel yang dikutip dari Suharno (2013) yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai, apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- 2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- 3) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, infrastruktur lainnya.
- 4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas

para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

- 5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- 6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.

c. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya (Suharno: 2013).

Evaluasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*evaluation*”. *Evaluation* kemudian disarikan kedalam istilah Bahasa Indonesia yaitu evaluasi yang berarti “penilaian”. Istilah evaluasi mempunyai

arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakaan. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn: 2000). Pada realitanya, apabila kebijakan tersebut mempunyai nilai dan memberikan kontribusi pada sasaran serta tujuan, maka akan membuat kebijakan ini menjadi semakin bermakna.

Menurut Patton dan Savicky dalam Nugroho (2003), evaluasi kebijakan merupakan evaluasi sitematis yang berkenaan dengan fisibilitas teknis dan ekonomi serta viabilitas politik alternatif kebijakan, strategi implementasi kebijakan dan adopsi kebijakan. Proses analisisnya dilakukan sebelum kebijakan atau setelah kebijakan (berbentuk deskriptif).

Dari beberapa pemaparan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai atau menganalisis tingkat kinerja suatu kebijakan baik dilakukan sebelum maupun setelah kebijakan dilaksanakan.

Dalam bukunya Suharno (2013) memaparkan beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, internal dan eksternal. Yang bersifat internal, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses ataukah sebaliknya.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakn dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
- 3) Untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan. Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

Sedangkan alasan yang bersifat eksternal paling tidak untuk dua kepentingan:

- 1) Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pengambil kebijakan kepada publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan.
- 2) Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan penerima, dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih terukur.

Kriteria untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan sangat terkait dengan kriteria rekomendasi kebijakan. Kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari 6 aspek, diungkapkan oleh Suharno (2013) dalam bukunya yaitu sebagai berikut:

1) Efektivitas

Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.

2) Efisiensi

Fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.

3) Adekuasi (Kecukupan)

Kriteria ini lebih mempersoalkan kememadaihan hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.

4) Kemerataan atau Ekuitas

Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.

5) Responsivitas

Kriteria ini lebih menyoal aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah

hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak.

6) Ketepatan

Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran.

2. Revitalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro (Sukriswanto: 2012). Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa revitalisasi bukan hanya berorientasi pada keindahan fisik saja, tetapi juga dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada.

Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (Suci: 2015). Revitalisasi dalam pelaksanaannya perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan dalam hal ini bukan hanya sekedar ikut serta

mendukung aspek formalitas, melainkan perlu partisipasi masyarakat dalam arti luas.

Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan pula potensi yang ada di lingkungan seperti sejarah, makna, serta keunikan dan citra lokasi (Suci: 2015). Salah satu cara merevitalisasi atau membangun pasar tradisional yang baru adalah menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi, seperti tempat bersantai dan rekreasi bersama dengan keluarga. Pendekatan yang lebih penting yaitu bagaimana mensinergikan pasar tradisional dan tempat perbelanjaan modern, sebagai kesatuan yang fungsional.

Dikutip dari tulisan Sukriswanto (2012) terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan program revitalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Kendala-kendala dalam revitalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyangkut problem tata ruang. Selama ini para pedagang berebut menempati lahan dasar (*lower ground*) untuk meraup keuntungan dari pembeli. Karena itu, kalau ada pembangunan, mereka khawatir lahan yang ditempati bakal digeser. Hal ini yang menyebabkan setiap terdapat rencana pembangunan mereka selalu menolak. Problem tata ruang ini memang cukup rumit. Mengingat hampir semua pasar tradisional tidak memiliki *room programming* (*site plan*) memadai. Terbukti belum adanya penyediaan sarana yang memudahkan pembeli menjelajah pasar, seperti tangga

berjalan, lift, dan lahan parkir. Tata ruang pasar dibiarkan begitu saja sehingga yang menempati lahan di luar *lower ground* selalu mendapatkan keuntungan kecil karena lebih jarang dikunjungi pembeli.

- b. Kecenderungan sosiologis pedagang pasar tradisional adalah menempatkan kecurigaan berlebihan (*over curiosity*) terhadap segala bentuk pembangunan. Mereka sering menyalah artikan, yakni pembangunan identik dengan penggusuran. Prasangka yang berkembang, setiap ada pembangunan berarti sewa atau pembelian stan menjadi barang mahal. Itu dipandang merugikan pedagang yang telah menempati stan pasar sebelumnya.

Menurut tulisan dari Darmawan dkk (2013) sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Intervensi Fisik

Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dari pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik reavitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas serta kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang tearbuka kawasan (*urban realm*). Isu

lingkungan (*environmental asustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

b. Rehabilitasi Ekonomi

Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota (P. Hall/U. Pfeiffer, 2001). Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).

c. Revitalisasi Sosial/Institusional

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), jadi bukan sekedar membuat tempat yang indah (*beautiful place*). Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun

selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

3. Pasar

Peran pasar sangat penting terhadap perekonomian masyarakat menengah kebawah. Selama aktivitas perekonomian berlangsung, terjadi interaksi antara pedagang, pembeli, pengelola pasar serta pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari guna memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan zaman yang semakin pesat dan didukung teknologi yang canggih maka akan semakin sulit mencari pekerjaan yang layak. Perlu *skill* dan pendidikan yang baik untuk bersaing mencari pekerjaan. Hal ini dapat menjadikan pasar sebagai lahan usaha masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh pendapatan.

Secara umum pasar dibedakan menjadi dua yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, pasar dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi di mana proses jual beli terbentuk.

a. Karakteristik Pasar

Masing-masing pasar memiliki karakteristik yang berbeda baik dari fisik maupun jenisnya. Menurut Hentiani (2011) dikutip dari

Sari (2016), jenis-jenis pasar dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Jenis pasar menurut jenis barang

Jenis-jenis pasar menurut barangnya, yaitu pasar yang hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya:

- a) Pasar hewan
- b) Pasar ikan dan daging
- c) Pasar loak
- d) Pasar seni

2) Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya

Menurut bentuk kegiatannya, pasar dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pasar nyata, yaitu pasar dimana barang-barang yang akan diperjual belikan dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya yaitu pasar tradisional dan swalayan.
- b) Pasar abstrak, yaitu pasar dimana para pedagangnya tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya engan menggunakan surat dagangannya saja contoh pasar online, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing.

3) Jenis pasar menurut transaksinya

Jenis pasar ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Pasar Modern

Menurut Sukei dkk (2009), pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik pada konsumen. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi dalam bentuk mall, supermarket, minimarket, department store, dan shopping center dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.

Pasar modern sendiri memiliki bentuk dan fasilitas yang lebih menarik serta teknologi canggih yang mengikuti perkembangan zaman. System pasar lebih terstruktur dan tertib. Hingga penjagaan pasar, keamanan pembeli, kenyamanan dan kebersihan sangat dijaga untuk membuat pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan/pembeli.

Pasar modern biasanya identik dengan produk-produk yang terpercaya dan berkualitas. Di pasar modern sudah dibentuk manajemen yang baik dan terstruktur

untuk mengelolanya. Sedangkan konsumen yang meminati pasar ini rata-rata yang berpendapatan menengah keatas. Contoh pasar modern seperti swalayan (*supermarket*) atau toko lengkap yang serba ada (*department store*).

b) Pasar Tradisional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Sedangkan menurut Sardilah dkk (2011), pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar menawar.

Di pasar tradisional kebanyakan pedagang menjual kebutuhan sehari-hari. Contoh dagangan yang dijual di pasar tradisional seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Namun pasar

tradisional memiliki kekurangan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, seperti keadaannya yang cenderung kotor dan kumuh sehingga banyak orang yang segan berbelanja di pasar tradisional.

Menurut Mudjarat Kuncoro (2008) dalam tulisannya “Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional”, terdapat isu utama yang berkaitan dengan perkembangan pasar tradisional, diantaranya yaitu :

- (1) Kondisi pasar tradisional secara fisik sangat tertinggal maka perlu ada program untuk melakukan pengaturan.
- (2) Penerapan berbagai macam syarat perdagangan oleh ritel modern yang memberatkan pemasok barang.
- (3) Tumbuh pesatnya minimarket (yang dimiliki pengelola jaringan) ke wilayah pemukiman.
- (4) Jarak antara pasar tradisional dengan hypermarket yang saling berdekatan.

4. Revitalisasi Pasar

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali kondisi pasar tradisional dapat berupa peremajaan dan renovasi keadaan fisik maupun non fisiknya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya menyelamatkan pasar tradisional yaitu dengan revitalisasi. Revitalisasi pasar tradisional merupakan program pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha

Kecil dengan sasaran memberdayakan para pelaku usaha mikro yang selama ini tumbuh di pasar yang belum memiliki fasilitas transaksi tempat berusaha yang layak, sehat, bersih, dan nyaman, serta dimiliki dan dikelola oleh pedagang sendiri dalam wadah koperasi. Program revitalisasi pasar tradisional digagas dengan maksud menjawab semua permasalahan yang melekat pada pasar tradisional. Penyebabnya, pasar tradisional dikelola tanpa inovasi yang berarti mengakibatkan pasar menjadi tidak nyaman dan kompetitif (Kasali, 2007).

Konsep revitalisasi pasar tradisional lebih luas dari sekedar perubahan fisik bangunannya saja, tetapi juga harus ada konsep bagaimana mendinamiskan pasar. Hampir setiap upaya revitalisasi pasar tradisional salah satunya menyediakan lapak-lapak atau kios-kios baru bagi para pedagang pasar, berujung pada ketidakpuasan pedagang karena informasi mengenai rencana dan pelaksanaan revitalisasi pasar tidak menyentuh semua pedagang hanya pada perwakilannya saja (Paskarina, dkk: 2007).

Kebijakan revitalisasi pasar tradisional merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sangat tepat untuk membuat pasar tradisional tetap hidup, berkembang dan disukai oleh masyarakat. Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional pemerintah bisa mengembalikan peran penting pasar tradisional untuk memasarkan produk-produk usaha kecil dan menengah (UKM) tidak kalah saing dengan pasar modern yang kian pesat berkembang. Pemerintah

mempunyai program revitalisasi pasar tradisional dimana dengan program tersebut pemerintah mencoba untuk menata pasar-pasar menjadi pasar modern. Revitalisasi tersebut meliputi membenahi manajemen pasar dan meningkatkan pengetahuan dasar bagi para pedagang (Rohmatun, dkk: 2015).

Revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk kesejahteraan masyarakat menghadapi beberapa kendala, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyangkut problem tata ruang. Selama ini para pedagang selalu berebut menempati lahan dasar (lower ground) untuk meraup keuntungan dari pembeli. Karena itu, jika ada pembangunan mereka khawatir lahan yang ditempati digeser. Hal ini yang menyebabkan setiap ada rencana pembangunan mereka selalu menolak. Problem tata ruang ini memang cukup rumit. Mengingat hampir semua pasar tradisional tidak program ruang memadai. Tata ruang pasar dibiarkan begitu saja sehingga yang menempati lahan di luar lantai dasar selalu mendapatkan keuntungan kecil karena lebih jarang dikunjungi pembeli.
- b. Kecenderungan sosiologis pedagang pasar tradisional adalah menempatkan kecurigaan berlebih terhadap segala bentuk pembangunan. Mereka sering menyalahartikan, yakni pembangunan identik dengan penggusuran. Prasangka yang

berkembang, setiap ada pembangunan berarti sewa atau pembelian stan menjadi barang mahal.

- c. Persepsi masyarakat terhadap masyarakat adalah kumuh, becek, kotor, dan minimnya fasilitas seperti terbatasnya tempat parkir, tempat sampah yang bau dan kotor, lorong yang sempit dan sebagainya. Kondisi ini yang menyebabkan masyarakat cenderung memilih berbelanja di pasar modern walaupun harga di pasar modern lebih mahal.

G. Definisi Konseptual

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai atau menganalisis tingkat kinerja suatu kebijakan baik dilakukan sebelum maupun setelah kebijakan dilaksanakan.

Kriteria untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan sangat terkait dengan kriteria rekomendasi kebijakan. Kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari 6 aspek, diungkapkan oleh Suharno (2013) dalam bukunya yaitu sebagai berikut:

- a. Efektivitas

Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.

- b. Efisiensi

Fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.

c. Adekuasi (Kecukupan)

Kriteria ini lebih mempersoalkan kememadaian hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.

d. Kemerataan atau Ekuitas

Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.

e. Responsivitas

Kriteria ini lebih menyoal aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak.

f. Ketepatan

Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran.

2. Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi mengalami kemunduran/degradasi.

Menurut tulisan dari Darmawan dkk (2013) sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Intervensi Fisik

Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dari pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik reavitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas serta kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (*urban realm*). Isu lingkungan (*environmental asustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

b. Rehabilitasi Ekonomi

Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local*

economic development), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota (P. Hall/U. Pfeiffer, 2001). Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (*vitalitas baru*).

c. Revitalisasi Sosial/Institusional

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), jadi bukan sekedar membuat tempat yang indah (*beautiful place*). Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

3. Pasar

Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.

4. Revitalisasi Pasar

Revitalisasi pasar tradisional merupakan program pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dengan sasaran memberdayakan para pelaku usaha mikro yang selama ini tumbuh di pasar yang belum memiliki fasilitas transaksi tempat berusaha yang layak, sehat, bersih, dan nyaman, serta dimiliki dan dikelola oleh pedagang sendiri dalam wadah koperasi.

H. Definisi Operasional

Variabel penelitian yang menjadi acuan peneliti yaitu evaluasi kebijakan revitalisasi pasar.

1. Revitalisasi diukur menggunakan teori dari Darmawan dkk. Indikator-indikator tersebut adalah:
 - a. Intervensi fisik
 - 1) Pembangunan gedung.
 - 2) Penambahan fasilitas.
 - 3) Penataan ruangan.
 - 4) Perencanaan pembangunan jangka panjang.
 - b. Rehabilitasi Ekonomi
 - 1) Program dana bergulir.
 - 2) Pelatihan bagi pedagang pasar.
 - c. Revitalisasi Sosial

- 1) Pendidikan tentang kebiasaan hidup bersih dan perawatan pasar.
 - 2) Peningkatan keamanan.
2. Kriteria untuk menghasilkan informasi mengenai evaluasi kebijakan dikutip dari buku Suharno (2013) yaitu sebagai berikut:
- a. Efektivitas
 - 1) Bangunan gedung pasar semakin megah.
 - 2) Lantai sudah bukan tanah lagi.
 - 3) Atap permanen.
 - b. Efisiensi
 - 1) Waktu pelaksanaan sesuai target yang ditetapkan.
 - 2) Bangunan gedung layak digunakan untuk beberapa tahun kedepan.
 - c. Adekuasi (kecukupan)
 - 1) Peningkatan volume barang dagang.
 - 2) Pendapatan meningkat.
 - d. Kemerataan (ekuitas)
 - 1) Fasilitas semakin lengkap.
 - 2) Kemerataan pengelompokan pedagang.
 - e. Responsivitas
 - 1) Respon baik yang diberikan oleh pengelola pasar.

- 2) Tercipta hubungan yang baik antar pedagang dan pengelola pasar.
- f. Ketepatan
- 1) Pasar lebih bersih dan teratur.
 - 2) Pedagang merasa aman dan nyaman.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu pendekatan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal*, teknik pengumpulan data *tringgulasi* (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono: 2010).

Tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan hasil dari evaluasi program revitalisasi pasar di Pasar Induk Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016.

2. Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Induk Bantul Kabupaten Bantul. Alasan pengambilan lokasi di Pasar Induk Bantul karena Bantul merupakan salah satu daerah yang memberikan aturan ketat terhadap pendirian pasar modern dan terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian lokal dengan merevitalisasi pasar. Salah satu pasar yang telah direvitalisasi yaitu Pasar Induk Bantul, dan masih belum lama diresmikan kembali.

Pasar Induk Bantul juga merupakan pasar induk yang terdapat di Kabupaten Bantul yang merupakan pusat perekonomian masyarakat. Sebagian besar warga Bantul berjualan pasar tradisional. Dari program revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah akan di evaluasi. Sehingga diketahui hasil serta manfaat dari program revitalisasi pasar tersebut.

3. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah narasumber yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
- b. Pegawai UPT Pasar Induk Bantul.
- c. Pedagang lama Pasar Induk Bantul yang menempati bangunan gedung pasar *pasca* revitalisasi.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang akan dituju. Melalui data primer diharapkan penelitian ini mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adapun data primer dalam penelitian ini akan dirinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Sumber Data Primer

No	Data	Sumber Data
1	Seputar revitalisasi pasar yang dilaksanakan di Pasar Induk Bantul serta fasilitas-fasilitas terbaru <i>pasca</i> revitalisasi	UPT Pasar Induk Bantul
2	Latar belakang, tujuan dan harapan diadakannya program revitalisasi pasar	Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul
3	Pertanyaan mengenai indikator dari evaluasi kebijakan revitalisasi pasar	Pedagang pasar lama yang menempati bangunan gedung <i>pasca</i> revitalisasi

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Sumber Data Sekunder

No	Dokumen
1	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar
2	Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul
3	Buku, jurnal, skripsi dan thesis tentang revitalisasi pasar tradisional dan evaluasi kebijakan publik
4	Media massa mengenai berita tentang revitalisasi Pasar Induk Bantul

5. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Dilakukan kepada instansi terkait untuk mengumpulkan data-data sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Penentuan narasumber dilakukan dengan *Snow Ball Sampling* dimana responden/narasumber diminta merekomendasikan beberapa narasumber yang berkompeten dan mengerti terhadap rumusan masalah yang akan dijawab. Untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai evaluasi kebijakan revitalisasi Pasar Induk Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016, peneliti melakukan wawancara dengan cara bertatap muka (*face to face*) dengan responden secara langsung untuk mengadakan tanya jawab mengenai masalah-masalah yang diteliti.

Disini penulis melakukan Wawancara dengan naasumber yang ada di Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul, UPT Pasar Induk Bantul pedagang pasar lama yang menempati bangunan baru *pasca* revitalisasi.

Tabel 1.5
Responden yang Diwawancarai

No	Nama	Jabatan
1	Ibu Nurul Adiati	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian
2	Ibu Sarjilah	Lurah Pasar Induk Bantul
3	Bapak Isdianto	Petugas Pembersih Pasar Induk Bantul
4	Ibu Sri Supatmi	Pedagang Gerabah/ Alat Rumah Tangga
5	Ibu Kartini	Pedagang Pakaian
6	Ibu Murni	Pedagang Sepatu dan Tas

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mencatat berbagai referensi seperti dari buku, jurnal, majalah, artikel, skripsi, tesis, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis sebelum dilapangan dilakukan terhadap data-data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih sementara dan masih bisa berkembang selama penelitian berlangsung. Selanjutnya yaitu analisis selama dilapangan

menggunakan model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2010) diantaranya yaitu:

a. Pengumpulan data

Merupakan informasi dari responden baik data primer maupun data sekunder.

b. Reduksi data

Merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

c. Penyajian data

Dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

d. Penarikan kesimpulan

Merupakan suatu usaha untuk menarik konklusi dari hal-hal yang ditemui dalam reduksi maupun penyajian data.